SKRIPSI

POLITICAL WILL PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)
Studi di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau

Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

Firman Tondy
Nim. E1051221004

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

1 dari 2

LEMBAR PERSETUJUAN

***POLITICAL WILL* PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)**
Studi di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Firman Tondy
NIM. E1051221004

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr.Zulkarnaen M.Si
NIP. 196402081988101001

Tanggal: 15.7.2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Ahirul Habib Padillah S.I.P., M.I.Pol
NIP. 199205122022031003

Tanggal: 22/07 2026

HALAMAN PENGESAHAN

***POLITICAL WILL* PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)**
Studi di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau

Oleh:

Firman Tondy

NIM. E1051221004

Dipertahankan di	: Pontianak
Pada Hari/Tanggal	: Rabu, 29 Juli 2026
Waktu	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang 3 FISIP UNTAN

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Zulkarnaen, M.Si	**Ahirul Habib Padilah, S.IP, M.I.Pol**
NIP. 196402081988101001	**NIP. 199205122022031003**
Penguji Pertama	**Penguji Kedua**
Dr. Ir. A. Tohardi, S.Pt M.M.,IPM.	**Akhmad Rifky Setya Anugrah S.IP,M.Sc**
NIP.196808251998031001	**NIP.199211132022031012**

Disahkan Oleh:
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Political Will* Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya aktivitas PETI yang berlangsung meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan melalui regulasi, sosialisasi, dan penertiban. Aktivitas PETI tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penanganan PETI sangat bergantung pada adanya *political will* yang kuat dari pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Penelitian ini menggunakan teori *Political Will* yang menitikberatkan pada komitmen pemerintah dalam menetapkan prioritas kebijakan, konsistensi tindakan, mobilisasi sumber daya, serta keberanian politik dalam menyelesaikan suatu permasalahan publik dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan dari instansi pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas PETI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *political will* Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menangani PETI telah ditunjukkan melalui berbagai kebijakan dan tindakan penertiban. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, serta ketergantungan sebagian masyarakat terhadap aktivitas PETI sebagai sumber mata pencaharian. Selain itu, upaya penegakan hukum yang belum konsisten menyebabkan aktivitas PETI masih terus berlangsung di beberapa wilayah Kecamatan Sekayam.

Kata Kunci: *Political Will*, Pemerintah Daerah, Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Komitmen Politik, Kecamatan Sekayam.

ABSTRACT

This research aimed to analyze the Political Will of the Sanggau Regency Government toward Unlicensed Gold Mining (PETI) activities in Sekayam Sub-district, Sanggau Regency. This research was motivated by the widespread PETI activities that continue even though the government has made various handling efforts through regulation, socialization, and control. PETI activities not only cause environmental damage, but also have an impact on social, economic, and legal aspects in the community. Therefore, the success of handling PETI depends very much on the existence of a strong political will from the local government in formulating and implementing policies. This research employed the Political Will theory which emphasizes the government's commitment in setting policy priorities, consistency of action, resource mobilization, and political courage in resolving a public problem with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation studies with informants from government agencies, law enforcement officials, community leaders, and parties related to PETI activities. The results show that the political will of the Sanggau Regency Government in handling PETI has been shown through various policies and control actions. However, its implementation still faces various obstacles such as limited resources, weak coordination between agencies, difficult geographical conditions of the region, and the dependence of some communities on PETI activities as a source of livelihood. In addition, law enforcement efforts that have not been consistent have caused PETI activities to continue in several areas of Sekayam Sub-district.

Keywords: *Political Will, Local Government, Unlicensed Gold Mining (PETI), Political Commitment, Sekayam Sub-district.*



RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini berjudul "*Political Will* Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih berlangsungnya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Sekayam meskipun berbagai upaya penanganan telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Aktivitas PETI menjadi salah satu persoalan yang kompleks karena tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses penambangan berpotensi mencemari lingkungan, merusak ekosistem sungai, serta mengancam kesehatan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan PETI bukan hanya masalah lingkungan semata, melainkan juga menyangkut tata kelola pemerintahan, kepatuhan hukum, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Kecamatan Sekayam merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sanggau yang memiliki aktivitas PETI yang cukup tinggi. Keberadaan sumber daya mineral yang melimpah serta faktor ekonomi masyarakat menjadi alasan utama berkembangnya aktivitas tersebut. Bagi sebagian masyarakat, PETI dianggap sebagai sumber penghasilan yang mampu memberikan keuntungan secara cepat dibandingkan pekerjaan lainnya. Di sisi lain, aktivitas tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif yang dapat merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan adanya *political will* yang kuat dari

Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menunjukkan komitmen, keseriusan, dan konsistensi dalam menangani aktivitas PETI.

Political will merupakan kemauan dan komitmen politik yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam menghadapi suatu persoalan yang menjadi perhatian publik. *Political will* dapat dilihat dari kesediaan pemerintah untuk menjadikan suatu masalah sebagai prioritas, mengambil keputusan yang diperlukan, mengalokasikan sumber daya, membangun koordinasi antaraktor, serta mempertahankan konsistensi tindakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks aktivitas PETI, *political will* menjadi faktor penting karena keberhasilan penanganannya sangat bergantung pada keseriusan pemerintah daerah dalam mengendalikan aktivitas penambangan ilegal dan meminimalkan dampak yang ditimbulkannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *political will* Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Penelitian menggunakan metode *purposive* dengan pendekatan deskriftif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas PETI. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai *political will* pemerintah daerah dalam menangani aktivitas PETI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menunjukkan adanya *political will* dalam menangani aktivitas PETI di Kecamatan Sekayam. Hal tersebut terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum, pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, dukungan terhadap kegiatan penertiban, serta berbagai langkah yang bertujuan untuk mengurangi aktivitas pertambangan ilegal. Pemerintah daerah juga menunjukkan perhatian terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI melalui berbagai forum koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait.

Meskipun demikian, *political will* yang ditunjukkan pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek sumber daya, masih terdapat keterbatasan jumlah personel, sarana pendukung, dan kemampuan pengawasan terhadap wilayah yang cukup luas. Selain itu, kondisi geografis Kecamatan Sekayam yang sebagian wilayahnya sulit dijangkau menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas PETI belum dapat dilakukan secara maksimal. Faktor ekonomi masyarakat juga menjadi tantangan utama karena sebagian masyarakat masih menggantungkan mata pencaharian mereka pada aktivitas penambangan emas tanpa izin.

Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan instansi terkait telah dilakukan, namun belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih terdapat kendala dalam penyelarasan langkah dan pelaksanaan tindakan di lapangan sehingga upaya penanganan PETI belum memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, tingkat

kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif PETI masih beragam. Sebagian masyarakat memahami risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut, sementara sebagian lainnya lebih mempertimbangkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan pertambangan.

Dari sisi komitmen politik, Pemerintah Kabupaten Sanggau menunjukkan keseriusan dalam merespons persoalan PETI yang terjadi di Kecamatan Sekayam. Namun demikian, konsistensi tindakan dan keberlanjutan upaya yang dilakukan masih perlu diperkuat agar mampu memberikan dampak yang lebih signifikan. Penanganan PETI tidak hanya memerlukan tindakan pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang mampu memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *political will* Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap aktivitas PETI di Kecamatan Sekayam telah terlihat melalui berbagai langkah, perhatian, dan tindakan yang dilakukan dalam upaya menangani persoalan tersebut. Akan tetapi, *political will* tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Keberhasilan penanganan PETI sangat dipengaruhi oleh konsistensi pemerintah, penguatan koordinasi antaraktor, dukungan sumber daya yang memadai, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung upaya pemerintah.

Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait, meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap aktivitas PETI, memperluas kegiatan edukasi kepada masyarakat, serta mendorong pengembangan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, upaya penanganan aktivitas PETI di Kecamatan Sekayam diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Firman Tondy

Nomor Mahasiswa : E1051221004

Program Studi : Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pontianak, 29 Juli 2026
Yang membuat pernyataan

Firman Tondy
Nim. E1051221004

HALAMAN DAN MOTTO PERSEMBAHAN

MOTTO

"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku."
FILIPI 4:13

"Jangan takut melangkah ketika jalan terasa berat. Sebab kekuatan terbesar bukan berasal dari dirimu sendiri, melainkan dari Tuhan yang selalu menyertaimu."

"Tidak semua proses akan mudah, tidak semua perjuangan akan berjalan sesuai harapan. Namun, setiap langkah yang ditempuh dengan iman akan membawamu lebih dekat kepada tujuan yang telah Tuhan siapkan."

"Jangan membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Tuhan memiliki waktu, rencana, dan cara yang berbeda bagi setiap orang. Tetaplah bertumbuh, tetaplah berusaha, dan percayalah bahwa segala sesuatu akan indah pada waktu-Nya."

"With God, every challenge becomes an opportunity to grow."

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Mamak dan Bapak, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, semangat, serta kerja keras tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan saya. Terima kasih atas segala perjuangan, kesabaran, dan ketulusan yang telah diberikan sehingga saya dapat menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan berkat yang berlimpah kepada Mamak dan Bapak.

2. Kepada kedua adik saya, Musli dan Rahadi, yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, serta motivasi kepada peneliti selama menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, perhatian, dan dukungan yang diberikan menjadi salah satu sumber kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan setiap tantangan selama masa perkuliahan.Keluarga besar, yang senantiasa memberikan motivasi, perhatian, serta dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Teman-teman satu kontrakan, Rio, Natan, Krisno, dan Riski, yang telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan saya. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, canda tawa, serta semangat yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Kristen Protestan (IMKP) yang telah menjadi tempat peneliti bertumbuh dalam iman, memperluas relasi, serta mengembangkan kemampuan berorganisasi selama masa perkuliahan.
5. Almamater tercinta, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, yang telah menjadi tempat saya belajar dan berkembang.
6. Keluarga besar PMM 4 UNITRI, khususnya Solidaritas Kelaparan dan Kencanawungu. Terima kasih atas kebersamaan, kekeluargaan, canda tawa, dukungan, dan pengalaman luar biasa yang telah diberikan. Kehadiran kalian menjadi salah satu bagian terindah dalam perjalanan perkuliahan saya. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan yang saling menguatkan, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan yang akan selalu

dikenang. Semoga persaudaraan yang telah terjalin tidak terputus oleh jarak dan waktu.

7. Untuk teman-teman KKM 11 dan masyarakat Desa Thang Raya yang juga selalu mendukung, serta selalu memberikan semangat saat masa KKM.
8. Kepada pemilik NIM E1011221038. Terima kasih karena selalu hadir dalam setiap proses perjalanan ini. Terima kasih atas doa, dukungan, pengertian, kesabaran, dan semangat yang tidak pernah putus selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah menjadi salah satu alasan untuk tetap kuat ketika menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. *God Bless U <3.*
9. FC Barcelona, yang secara tidak langsung telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan saya. Terima kasih atas setiap pertandingan, perjuangan, dan momen yang telah menjadi hiburan serta penyemangat di tengah kesibukan perkuliahan dan proses penyusunan skripsi. Semoga semangat, kerja keras, dan filosofi yang melekat pada klub ini senantiasa menjadi inspirasi bagi saya untuk terus berproses, berjuang, dan berkembang dalam menjalani kehidupan.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul "*Political will* Pemerintah Kabupaten Sanggau Terhadap Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Studi Di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau". Skripsi ini disusun sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam proses penyusunan ini tentunya tidak terlepas dari adanya tantangan serta perjuangan yang luar biasa. Hal tersebut bisa menjadi mungkin karena adanya dukungan dari berbagai pihak yang luar biasa . Sebagaimana mestinya peneliti menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dukungan, fasilitas, serta kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si**.** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi yang telah memberikan arahan, dukungan, serta kemudahan dalam proses akademik sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Herri Junius Nge, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik yang telah memberikan arahan, dukungan, serta kemudahan dalam proses akademik kepada peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat

diselesaikan dengan baik.Dr.Zulkarnaen M.Si selaku Dosen Pembimbing utama yang telah bersedia memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

4. Ahirul Habib Padillah S.I.P., M.I.Pol sebagai Dosen Pembimbing Kedua yang juga beperan memberikan bimbingan, petunjuk bimbingan untuk menyelesaikan penulisan dan penelitian Skripsi ini.
5. Dr. H. Ahmad Tohardi selaku Dosen Penguji Pertama yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat disempurnakan.
6. Akmad Rifky Setya Anugrah, S.IP., M.Sc. selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang konstruktif dalam penyempurnaan penulisan dan penelitian skripsi ini.
7. Wakil Dekan I, II, III, dan para dosen yang terhormat, terima kasih atas pengetahuan, kebijaksanaan, dan dedikasi yang tak terhingga dalam membentuk cendekiawan muda hebat yang bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada peneliti salama proses pengerjan proposal ini, mendapatkan balasan dari Tuhan dan harapan peneliti biarlah hasıl karya ini dapat memberikan, menyumbang

pemikiran maupun acuan bagi para pembaca. Untuk menulis serta memberikan manfaat yang cukup bagi kita semua, secara khusus mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak dan menambah wawasan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Politik.

Pontianak, 29 Juli 2026

Firman Tondy
E1051221004

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR TABEL ..... **xix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xx**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxi**
DAFTAR BAGAN ..... **xxii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Penelitian 1z
1.2. Identifikasi Masalah 11
1.3. Fokus Penelitian 12
1.4. Rumusan Masalah 12
1.5. Tujuan Penelitian 12
1.6. Manfaat Penelitian 13
1.6.1 Manfaat Teoritis 13
1.6.2 Manfaat Praktis 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**
2.1. Definisi Konsep 15
2.2. Kajian Teori 15
2.2.1 Teori *Political Will* 15
2.3. Penelitian Yang Relevan 19
2.4. Kerangka Pikir Penelitian 23
2.5. Pertanyaan Penelitian 26
BAB III METODE PENELITIAN **27**
3.1. Jenis Penelitian 27
3.2. Langkah-langkah Penelitian 28
3.2.1. Tahap Pra Lapangan 28
3.2.2. Tahap Kerja Lapangan 28
3.2.3. Tahap Analisis Data 29
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 30
3.3.1. Lokasi Penelitian 30
3.3.2. Waktu Penelitian 32
3.4. Subjek Dan Objek Penelitian 32
3.4.1. Subjek Penelitian 32
3.4.2. Objek Penelitian 35

3.5. Teknik Pengumpulan Data 36
3.6. Alat Pengumpulan Data..... 39
3.7. Analisis Data 41
3.7.1. Teknik Analisis Data 41
3.7.2. Teknik Keabsahan data 42
BAB IV GAMBARAN UMUM..... 45
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sanggau 45
4.1.1 Visi dan Misi.....45
4.1.2 Kondisi wilayah Kabupaten Sanggau.....47
4.1.3 Kondisi Wilayah Kecamatan Sekayam 51
4.1.4 Kondisi Wilayah Desa Malenggang.....54
4.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau 55
4.3 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sanggau 57
4.5 Gambaran Umum Kecamatan Sekayam 58
4.5 Gambaran Umum Desa Malenggang 59
4.6 Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sanggau 61
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 63
5.1 Hasil Penelitian 63
5.1.1 Komitmen Aktor Politik.....64
5.1.2 Konsistensi Dalam Penggunaan Otoritas 73
5.1.3 Keberanian Menghadapi Resistensi 80
5.1.4 Alokasi Sumber Daya Politik 88
5.1.5 Konsistensi Tindakan 94
5.2 Pembahasan..... 101
5.2.1 Komitmen Aktor Politik.....102
5.2.2 Konsistensi Penggunaan Otoritas.....104
5.2.3 Keberanian Menghadapi Resistensi 106
5.2.4 Alokasi Sumber Daya Politik 107
5.2.5 Konsistensi Tindakan 108
5.2.6 Implikasi Hasil Penelitian terhadap Penanganan PETI 111
BAB VI PENUTUP 113
6.1 Kesimpulan.....113
6.2 Sar.....115
6.3 Keterbatasan Penelitian 117
DAFTAR PUSTAKA..... 120
LAMPIRAN..... 123
DAFTAR NAMA SUBJEK PENELITIAN..... 145

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

1.1 Bentuk *Politicall Will* 10
2. 1 Penelitian Yang Relevan..... 20
3.1 Waktu Penelitian.....32

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

1. 1 Aktivitas PETI Di Sekayam 6
1. 2 Pernyataan Bupati Sanggau Pada Launching Aplikasi Lapor Pak Bupati 7
2. 3 Pernyataan Ketua DPRD Sanggau Pada Rapat Forkopimda 9
4.1 Peta Wilayah Kabupaten Sanggau 48
4. 2 Peta Aliran Sungai di Kabupaten Sanggau 50
4. 3 Peta Wilayah Kecamatan sekayam..... 51
5. 1 Surat Edaran Larangan PETI di Kabupaten Sanggau 69
5. 2 Pemberitaan Media Mengenai PETI di Kabupaten Sanggau..... 79
5. 3 Lokasi PETI di Desa Malenggang 87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

1. Surat Tugas Penelitian 123
2. Daftar Informan 125
3. Panduan Observasi 139
4. Dokumentasi Penelitian 142
5. Biodata Peneliti 146

DAFTAR BAGAN

Bagan *halaman*

2. 1 Alur Pikir Penelitian 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Isu penambangan emas tanpa izin (PETI) telah menjadi persoalan serius di berbagai wilayah Indonesia karena berdampak langsung terhadap lingkungan, ekonomi, dan tatanan sosial masyarakat. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas relasi antara kebijakan pemerintah, kepentingan ekonomi, serta kapasitas politik dalam mengelola sumber daya alam. Aktivitas tambang ilegal di negara berkembang sering kali muncul akibat ketimpangan ekonomi, lemahnya tata kelola, dan belum terbentuknya komitmen politik yang konsisten dari pemerintah (Wibowo et al. 2022).

Isu PETI di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi-politik di tingkat lokal. Praktik tambang ilegal yang terus berlangsung memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan realitas implementasi di lapangan, terutama ketika kepentingan ekonomi masyarakat dan aktor tertentu lebih dominan daripada regulasi formal. Ketidakmampuan pemerintah daerah menegakkan tata kelola lingkungan secara konsisten semakin memperkuat ruang bagi PETI untuk berkembang. Dengan demikian, fenomena PETI bukan sekadar masalah hukum, tetapi merupakan gambaran bagaimana lemahnya kapasitas institusional dan ketidakhadiran komitmen politik menciptakan siklus berulang antara kerusakan ekologis, kepentingan ekonomi, dan rapuhnya legitimasi pemerintah.

Aktivitas PETI tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis seperti pencemaran sungai dan degradasi tanah, tetapi juga menimbulkan konflik sosial di wilayah sekitar tambang. Maraknya PETI di Kalimantan Barat juga mencerminkan lemahnya tata kelola lingkungan dan rendahnya kesadaran ekologis pemerintah daerah (Sutopo 2020).

Aktivitas PETI pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hukum yang juga menguji sejauh mana otoritas politik negara mampu menegakkan kontrolnya terhadap sumber daya alam. Secara yuridis, aktivitas PETI tergolong sebagai kegiatan pertambangan ilegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang menegaskan bahwa setiap kegiatan penambangan wajib memiliki izin resmi dari pemeriintah. Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya izin resmi dalam setiap kegiatan pertambangan sebagai bentuk pengendalian negara terhadap sumber daya alam.

Dalam konteks ini, kemauan politik *(political will)* menjadi faktor kunci yang menentukan sejauh mana pemerintah berkomitmen dan berupaya secara serius dalam menangani permasalahan PETI. Kebijakan lingkungan yang lemah dan bersifat reaktif sering kali muncul akibat rendahnya kemauan politik, sehingga upaya penanganan menjadi tidak berkelanjutan (Yeboah et al. 2024).

Hal ini membuat penegakan aturan hanya muncul ketika terjadi tekanan publik atau operasi penertiban massal, bukan sebagai bagian dari strategi tata kelola yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pengendalian PETI tidak

hanya memerlukan komitmen politik yang kuat, tetapi juga sistem tata kelola yang transparan serta koordinasi antarlembaga yang mampu menutup celah-celah struktural yang selama ini memungkinkan PETI bertahan.

Ketiadaan komitmen politik yang konsisten sering kali membuat kebijakan penanggulangan tambang ilegal bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan penanganan PETI sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menunjukkan kemauan politik yang nyata, disertai tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan koordinasi lintas sektor yang efektif untuk mengurai ekonomi politik di balik aktivitas tersebut (Rohman, Hartiwiningsih, and Rustamaji 2024).

Keterlibatan masyarakat dalam PETI menunjukkan bahwa persoalan tambang ilegal tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial-ekonomi yang terbentuk di sekitar wilayah tambang. Ketimpangan kesempatan kerja, minimnya alternatif pendapatan, serta tekanan kebutuhan hidup membuat PETI menjadi pilihan rasional bagi sebagian warga. Situasi ini menjelaskan mengapa berbagai kebijakan penertiban yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak mampu menghentikan praktik tersebut secara permanen.

Di Indonesia, permasalahan PETI masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pemerintah pusat dan daerah telah berupaya melakukan penertiban melalui kebijakan, surat edaran, dan operasi lapangan. Namun, aktivitas PETI tetap berlangsung dan cenderung berulang. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara komitmen formal pemerintah dengan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal (Mustafa 2024).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan pendekatan kebijakan pemerintah dalam menangani PETI. Ketika kebijakan tidak menyediakan alternatif ekonomi yang realistis, masyarakat tetap memilih PETI sebagai strategi bertahan hidup. Hal ini menandakan bahwa persoalan PETI tidak dapat diselesaikan hanya lewat penertiban, tetapi memerlukan model tata kelola pertambangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif memungkinkan masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif terhadap kondisi lokal dan mampu mengurangi ketergantungan warga pada aktivitas tambang ilegal.

Kondisi ini menunjukkan perlunya tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan partisipatif agar kebijakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif dan melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam pengawasan sumber daya alam (Yusuf and Pratama 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji political will pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menangani aktivitas penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Sekayam. Pemahaman tentang *political will* sangat penting untuk mengetahui sejauh mana komitmen dan tindakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah PETI yang berdampak luas tersebut. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tantangan dan peluang dalam penegakan hukum serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di tingkat daerah (Chervier, Piketty, and Reed 2020).

Dalam kajian Ilmu Politik, *political will* dipahami sebagai kekuatan strategis yang memengaruhi arah kebijakan dan agenda politik suatu pemerintahan. Konsep ini bersifat kompleks karena mencakup beragam dimensi yang saling berhubungan antara aktor politik, dan dinamika kekuasaan. Selain itu, komitmen pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya, menegakkan aturan dan sanksi, serta menjaga kesinambungan kebijakan melalui proses pembelajaran politik yang berkelanjutan juga menjadi penanda utama adanya kemauan politik (Abazović and Mujkić 2015).

Menurut penelitian dalam jurnal *Measuring Political Will in Organization*, *political will* tidak hanya merupakan komitmen atau niat para pemimpin untuk mengambil tindakan, tetapi juga mencakup perilaku nyata dan kemampuan politik dalam mengelola dinamika serta hambatan yang ada. Political will adalah kombinasi dari kesungguhan internal, tindakan konsisten, dan keterampilan politik yang mencerminkan kapasitas aktor dalam menggunakan kekuasaan secara efektif (Kapoutsis et al. 2023).

Oleh karena itu, pengukuran *political will* perlu mencakup aspek perilaku serta kapasitas politik, bukan sekadar niat. Dalam konteks penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Sekayam, *political will* pemerintah daerah seharusnya tampak melalui tindakan konkret dan kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan politik serta sosial, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Jannah 2022).

Dalam konteks Kabupaten Sanggau, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan aktivitas PETI, salah satunya melalui penerbitan surat edaran pelarangan PETI yaitu penerbitan surat edaran larangan

PETI (No. 500.10.2.3./11/ EKSDA). Serta koordinasi lintas lembaga dengan aparat penegak hukum. Namun demikian, meskipun langkah-langkah tersebut secara formal menunjukkan adanya respons politik, efektivitas dan konsistensinya masih menjadi tanda tanya. Beberapa kebijakan dan operasi yang dilakukan sering kali bersifat sementara dan belum menghasilkan perubahan signifikan terhadap praktik PETI di lapangan (Editor 2025).

Secara keseluruhan, respons Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap aktivitas PETI memang terlihat melalui penerbitan surat edaran larangan PETI serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Namun, langkah-langkah tersebut belum cukup untuk menunjukkan *political will* yang kuat. Respons yang muncul cenderung bersifat formal dan temporer, sehingga tidak menghasilkan perubahan berarti di lapangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah komitmen pemerintah benar-benar substantif atau hanya sebatas simbol politik yang ditampilkan ketika diperlukan.

Gambar 1.1
Aktivitas PETI di Sungai Sekayam



Sumber : Pontianak Post 2025.

Aktivitas PETI di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau merupakan tindakan ilegal yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menantang otoritas politik pemerintah daerah. Lemahnya pengawasan menunjukkan belum optimalnya *political will* pemerintah dalam mempertahankan kontrol politik negara di tingkat lokal.

Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa *political will* merupakan konsep yang sering kali digunakan secara retoris oleh pemerintah tanpa disertai tindakan substantif. Oleh karena itu, penting untuk menelaah apakah komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau benar-benar mencerminkan *political will* yang kuat dan berkelanjutan, atau hanya sebatas simbol politik yang muncul karena tekanan publik dan media, mengingat efektivitas kebijakan sangat bergantung pada konsistensi serta keberanian politik dalam mengambil langkah nyata (Hammergren 1998).

Gambar 1.2
Pernyataan Bupati Sanggau Pada Launching Aplikasi Lapor Pak Bupati



Sumber: Fakta kalbar.id. 2025.

Gambar di atas menunjukkan momen ketika Bupati Sanggau menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam penanganan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Pernyataan tersebut disampaikan pada saat kegiatan *Launching* Aplikasi Lapor Pak Bupati, yang menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dan pengaduan terkait berbagai persoalan di daerah, termasuk aktivitas PETI.

Meskipun secara struktural Pemerintah Kabupaten Sanggau memiliki otoritas formal dalam penanganan PETI, belum terlihat adanya mobilisasi sumber daya politik secara optimal. Alokasi sumber daya politik seperti dukungan anggaran, kapasitas lembaga, serta konsolidasi aktor politik di tingkat eksekutif dan legislatif masih terbatas dan belum menunjukkan arah kebijakan yang tegas. Hal ini juga menunjukkan keterbatasan dalam konsolidasi politik antara eksekutif dan legislatif untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan dukungan anggaran dalam penanganan PETI.

Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, pada Rapat Forkopimda menyatakan dukungan terhadap kebijakan pelarangan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pernyataan tersebut mencerminkan adanya perhatian dari unsur legislatif terhadap persoalan pertambangan ilegal yang berdampak luas bagi lingkungan dan masyarakat. Namun, dukungan politik semacam ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk melihat sejauh mana ia mencerminkan *political will* yang substantif, bukan sekadar pernyataan normatif atau simbolik dalam ranah politik daerah (Ferandi 2025).

Gambar 1.3
Pernyataan Ketua DPRD Sanggau pada Rapat Forkopimda



Sumber: RRI Entikong 2025.

Pada September 2025, saat melaksanakan rapat Forkopimda ketua DPRD Kabupaten Sanggau menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah daerah dalam menertibkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sebagai bentuk keprihatinan atas dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan di beberapa kecamatan, termasuk Entikong dan Sekayam. Pernyataan ini menunjukkan adanya perhatian legislatif terhadap isu penegakan hukum, namun dalam kajian ilmu politik perlu dianalisis lebih jauh apakah dukungan tersebut mencerminkan *political will* yang nyata atau sekadar repons terhadap tekanan sosial dan lingkungan.

Dukungan legislatif sering kali muncul ketika isu PETI menjadi sorotan publik. Namun, yang perlu dipertanyakan adalah apakah pernyataan tersebut benar-benar diikuti langkah politik yang konsisten, seperti pengawasan anggaran dan dorongan kepada eksekutif.

Tabel 1. 1
Bentuk *Political Will*

NO.	Instansi / Lembaga	Tahun	Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1.	Bupati Sanggau (Yohanes Ontot)	2025	Audiensi resmi dengan penambang PETI	Kabupaten Sanggau	+ 20 penambang, membahas solusi legalisasi (WPR/IPR)
2.	Bupati Sanggau (Yohanes Ontot)	2025	Penerbitan Surat Edaran Pelarangan PETI (No.500.10.2.3/11/ EKSDA)	Seluruh Kabupaten Sanggau	Pelarangan resmi seluruh aktivitas PETI
3.	Bupati Sanggau (Yohanes Ontot)	2025	Audiensi resmi dengan penambang PETI	Kecamatan Kapuas & Kecamatan Bonti	+ 20 penambang, membahas solusi legalisasi (WPR/IPR)

Sumber: Pontianak Post, 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Bupati Yohanes Ontot telah menunjukkan sejumlah langkah politik, seperti audiensi dengan para penambang PETI dan penerbitan surat edaran pelarangan aktivitas tambang ilegal di seluruh wilayah kabupaten. Langkah-langkah tersebut secara formal menunjukkan adanya respons politik terhadap persoalan PETI.

Namun, meskipun inisiatif tersebut menggambarkan adanya kemauan politik di tingkat pimpinan daerah, kegiatan PETI masih terus berlangsung di beberapa kecamatan. Kondisi ini menandakan bahwa *political will* yang ditunjukkan belum

sepenuhnya konsisten dan berkelanjutan, terutama dalam penerapan otoritas dan koordinasi lintas lembaga untuk mengatasi akar persoalan secara tuntas.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan konseptual dan kontekstual dalam kajian tata kelola pertambangan ilegal dengan memfokuskan analisis pada dimensi *political will* pemerintah daerah sebagai variabel utama dalam efektivitas penanganan PETI. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, dampak lingkungan, atau faktor sosial-ekonomi masyarakat penambang, penelitian ini secara spesifik mengeksplorasi bagaimana komitmen politik, keberpihakan kebijakan, konsistensi implementasi, serta koordinasi lintas sektor membentuk respons pemerintah daerah terhadap praktik PETI.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.) Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Sekayam masih marak meskipun telah ada kebijakan pelarangan dan penertiban. Aktivitas ini merupakan tindakan ilegal yang menunjukkan lemahnya kontrol politik negara serta belum maksimalnya peran aktor utama *(leading sector),* yaitu Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Satpol PP.
2.) *Political will* pemerintah daerah dalam menangani PETI belum sepenuhnya berlanjut hingga tahap penindakan yang tegas dan berkelanjutan.

1.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengacu pada *"Political Will* Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) studi di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana bentuk *political will* Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menangani aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *political will* Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam merespons aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sebagai tindakan ilegal yang merusak lingkungan dan melanggar otoritas negara. Fokus penelitian diarahkan untuk melihat sejauh mana *leading sector*, yakni Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), DPRD,Camat Sekayam, Kades Malenggang dan Satpol PP, menunjukkan komitmen politik yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menelaah apakah kemauan politik tersebut benar-benar terwujud hingga tahap penindakan dan koordinasi lintas sektor, atau berhenti sebatas pernyataan dan kebijakan tanpa tindak lanjut konkret.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Ilmu Politik, khususnya dalam analisis *political will* di tingkat pemerintahan daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana kemauan politik pemerintah daerah terbentuk, dijalankan, dan dibatasi oleh dinamika kekuasaan serta kepentingan politik lokal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas penerapan teori *political will* (Brinkerhoff dalam (Abazovic 2015). konteks isu sumber daya alam ilegal, sehingga dapat menjadi rujukan konseptual bagi penelitian serupa di bidang politik lingkungan dan tata kelola kekuasaan daerah.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana *political will* Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menangani aktivitas PETI, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pola respons yang selama ini belum konsisten, serta mendorong langkah penanganan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan dinamika sosial di lapangan:

1.) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kritis kepada pemerintah daerah mengenai sejauh mana *political will* yang selama ini ditunjukkan melalui berbagai pernyataan dan langkah politik benar-benar diwujudkan dalam tindakan yang berkelanjutan di lapangan. Temuan penelitian

ini diharapkan membantu pemerintah daerah menilai apakah komitmen politik yang ada telah bersifat substantif, atau hanya sekadar simbolik sebagai respons terhadap tekanan publik dan media.

2.) Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi para aktor politik daerah terutama Bupati, DPRD, aparat penegak hukum, dan dinas teknis terkait untuk memperkuat konsistensi dan keberanian politik dalam menghadapi persoalan PETI. Hambatan dalam relasi kekuasaan antar lembaga sering kali membuat *political will* berhenti di tataran simbolik, sehingga penelitian ini menekankan pentingnya kesatuan sikap politik, bukan sekadar tindakan penertiban yang bersifat sporadis.

3.) Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman baru bagi masyarakat dan organisasi sipil tentang pentingnya membangun *political will* yang berpihak pada kepentingan publik serta memperkuat legitimasi pemerintah daerah dalam menangani PETI secara konsisten, bukan simbolik.